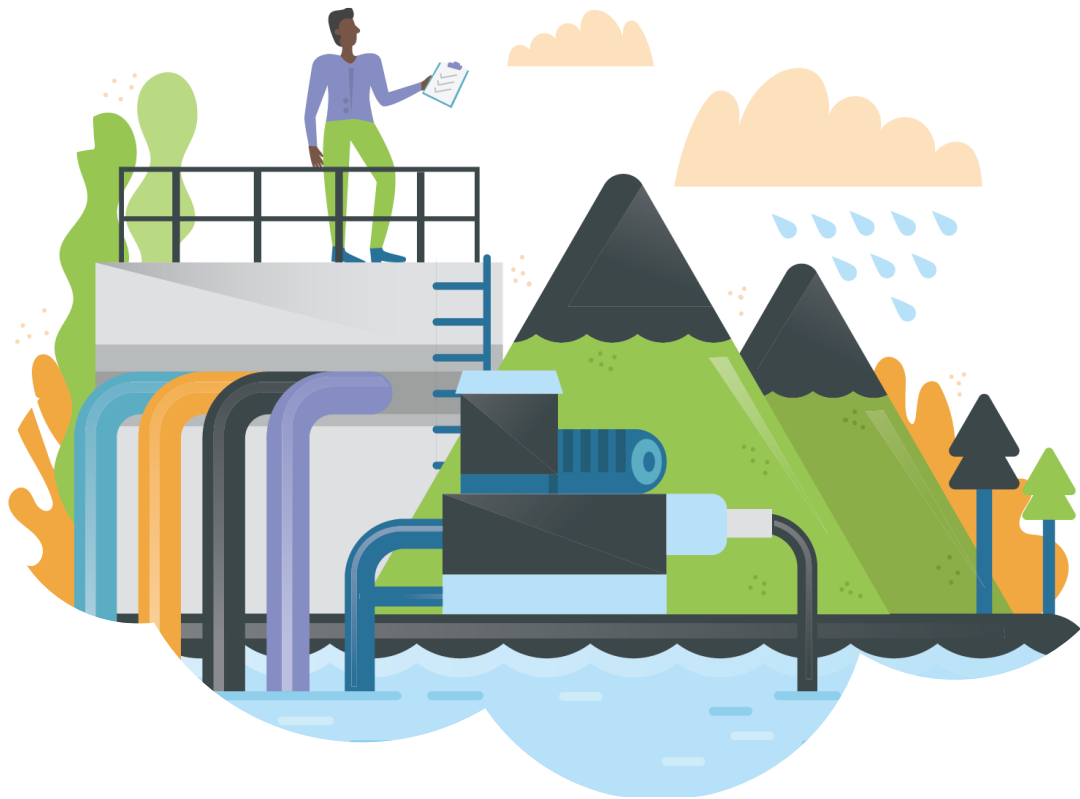




**DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN**

**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH

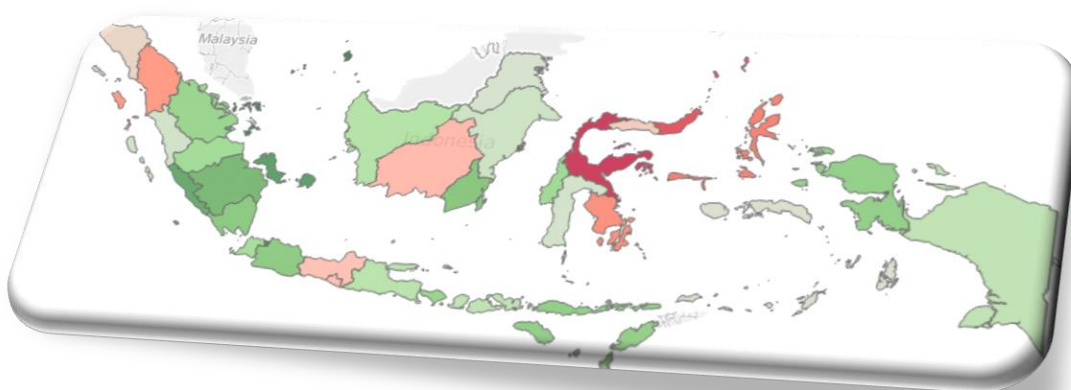


Periode 12 s.d. 23 Oktober 2020

Astera Primanto Bhakti • Harry Z. Soeratin • Putut Hari Satyaka • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi • Subandono • Sugiyarto • Amrul Yusroni • Yadi Hadian • Jackwin Simbolon • Mulyono • Kurnia • Radies Kusprihanto Purbo • Adrian Kusuma Pratama • Purwandi Santoso • Arifudin Miftakul Huda • Mario Agustino • Eko Arisyanto • Britany Alasen Sembiring • Desy Puspita Anggraeni • Nabillah Rahma • Nadia Nurul Nisa • Narits Muhammad Syafruddin • Selma Syifa Khoirunnisa

KINERJA PEREKONOMIAN

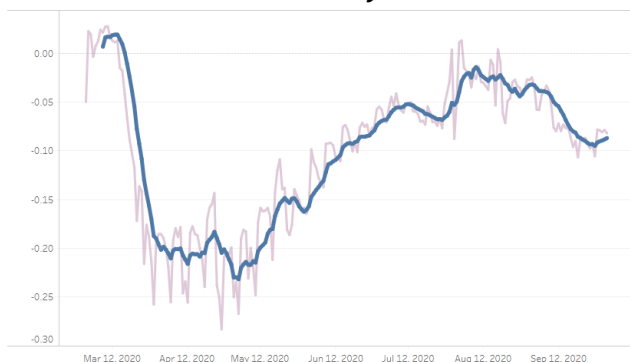
PERKEMBANGAN TINGKAT AKTIVITAS EKONOMI DI DAERAH



Delta *Mobility Index* 21 Sep – 2 Oktober



National Mobility Index



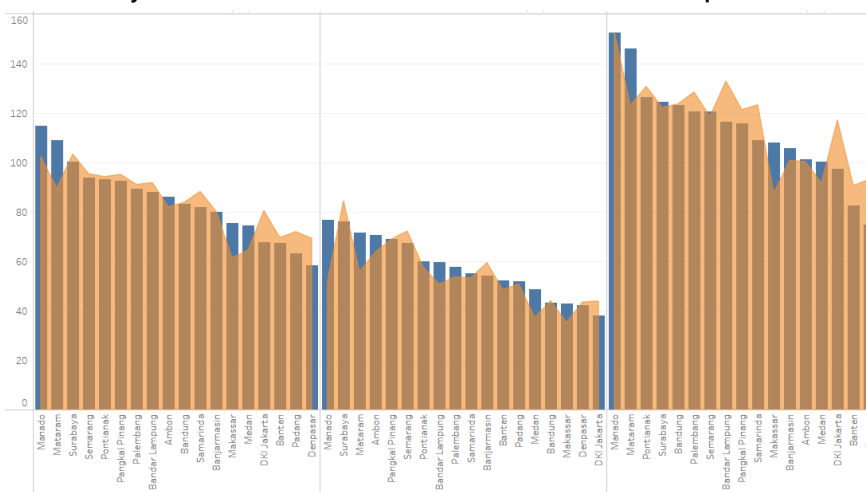
Top & Bottom Three Mobility Index per 2 Oktober 2020



Berdasarkan nilai *mobility index** dalam dua minggu terakhir, **aktivitas perekonomian pada sebagian besar wilayah mengalami peningkatan**, kecuali pada sebagian besar daerah di Sulawesi dan Maluku Utara. **Peningkatan tertinggi** terjadi di **Kepulauan Riau** (-0,0207 menjadi 0,0376), **Jakarta** (-0,0398 menjadi 0,0170), dan **Bangka Belitung** (0,0314 menjadi 0,0744). Namun, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami **penurunan tingkat aktivitas ekonomi**, tertinggi di **Sulawesi Tengah** (0,0799 menjadi 0,0268), **Sulawesi Utara** (0,1336 menjadi 0,0911), dan **Maluku Utara** (0,1128 menjadi 0,0854).

PERKEMBANGAN INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN & EKSPEKTASI HARGA (18 KOTA)*

Indeks Keyakinan Konsumen Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini Indeks Ekspektasi Konsumen



Indeks Keyakinan Konsumen terhadap kondisi ekonomi menurun di September 2020 dibandingkan Agustus 2020, yaitu dari 86,9 menjadi 83,4. **Penurunan** terjadi di 13 dari 18 kota survei dengan penurunan **terdalam** di **Jakarta**, **Depasar**, dan **Padang**. Hal ini disebabkan oleh penurunan ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan penurunan ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi 6 bulan mendatang.

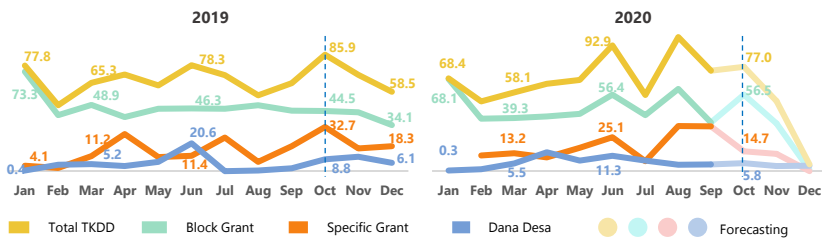
*sumber: CSIS Indonesia dan Bank Indonesia



KINERJA FISKAL

PEMERINTAH PUSAT

TKDD Januari s.d. 9 Oktober 2020 (YoY)
(dalam triliun rupiah)

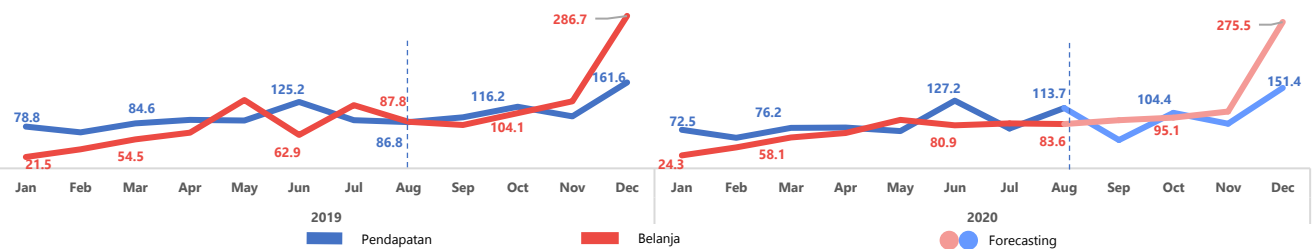


- Realisasi TKDD Rp661,4 T atau 86,6% dari pagu TKDD.
- Realisasi ini naik 9,3% dari periode yang sama th 2019 yang sebesar Rp604,9 T.
- Dalam 2 minggu terakhir, terdapat kenaikan realisasi Rp73,7 T atau 12,5%.
- BLT Desa telah disalurkan ke 98,9% desa sebesar Rp16,8 T kepada 7.983.289 KPM.
- Sampai akhir 2020, diperkirakan realisasi TKDD mencapai Rp765,3 T (100,2%) karena adanya penyelesaian Kurang Bayar DBH.

PEMERINTAH DAERAH

APBD Januari s.d. Agustus 2020 (YoY)
(dalam triliun rupiah)

- Realisasi Pendapatan turun 6,3% dari Rp714,7 T menjadi Rp669,5 T (YoY) dengan penurunan terbesar dari PAD dan TKDD.
- Realisasi Belanja turun 8,5% dari Rp577,7 T menjadi Rp528,4 T (YoY), karena turunnya seluruh jenis belanja, kecuali Belanja Tak Terduga (BTT) yang naik dari Rp0,4 T menjadi Rp18,5 T (YoY).
- Realisasi pembiayaan netto mengalami penurunan 27,2% dari Rp53,8 T menjadi Rp39,2 T (YoY) yang sumber utamanya dari penggunaan SILPA TA sebelumnya.



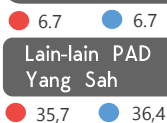
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



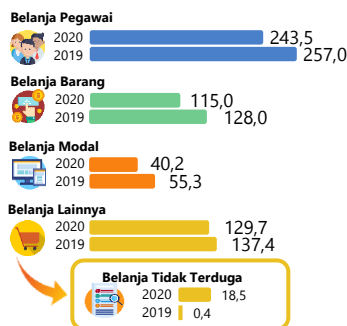
Retribusi Daerah



Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan



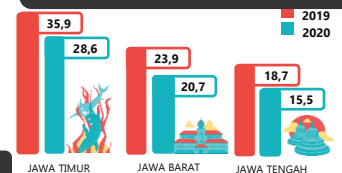
BELANJA DAERAH



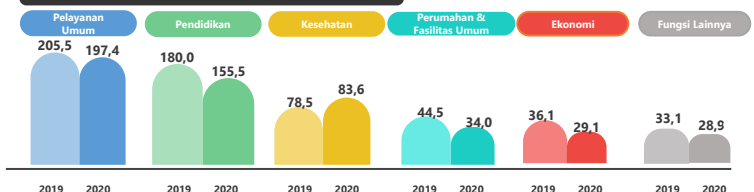
PEMBIAYAAN DAERAH



POSISI KAS DAERAH AGREGAT PROVINSI TERTINGGI



BELANJA BERDASARKAN FUNGSI



- Pembatasan aktivitas menyebabkan turunnya realisasi pajak konsumtif, seperti pajak hotel (-46%), pajak restoran (-36%), pajak hiburan (-58%), dan PBBKB (-18%)
- Realisasi belanja daerah masih bertumpu pada realisasi belanja pegawai dan barang/jasa sebesar 67,8% (Rp358,5 T).
- Realisasi BTT masih perlu diakselerasi karena serapannya baru mencapai 38,4% dari total anggaran penanggulangan COVID-19.

KINERJA LAYANAN

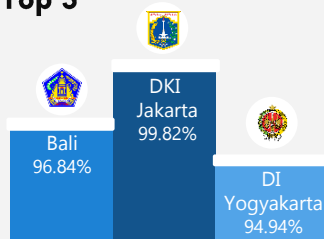
SISI DEMAND LAYANAN

Secara nasional *output* kinerja penyediaan air minum layak dan akses air minum perpipaan sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa provinsi yang belum mencapai target nasional.

1 Persentase Rumah Tangga dengan akses Air Minum Layak

secara nasional pada tahun 2019 sebesar 89,27%. Target pada RPJMN 2020-2024 untuk capaian akses air minum layak sebesar 100%. Hingga 2019, masih terdapat 20 Provinsi yang memiliki kinerja di bawah angka nasional.

► Top 3



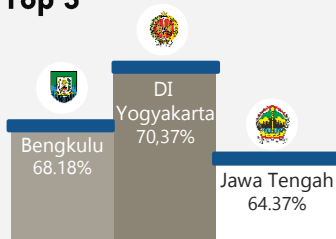
► Bottom 3



2 Jika dilihat dari sumber air minumnya, capaian Akses Air Minum Perpipaan

nasional masih perlu dioptimalkan. Hingga 2019, persentase Rumah Tangga yang menggunakan perpipaan sebagai media akses air minum secara nasional baru mencapai 50,68%.

► Top 3



► Bottom 3



3 Aspek keterjangkauan sesuai SDGs dapat dilihat dari indikator Waktu Akses

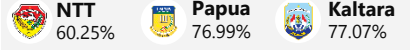
Menuju Ke Sumber Air.

Secara nasional, 89,41% rumah tangga membutuhkan waktu di bawah 30 menit. Di beberapa daerah, persentase rumah tangga yang kesulitan menjangkau sumber air (>30 menit) masih sangat tinggi

► Top 3



► Bottom 3



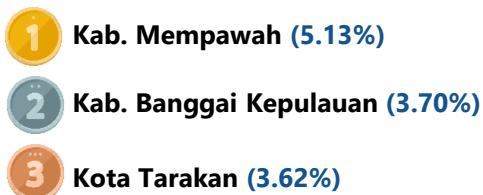
SISI SUPPLY LAYANAN

Pada aspek penyediaan layanan, kinerja layanan air minum masih belum optimal.

Belanja terkait Air Minum dan PDAM

Total belanja APBD TA 2020 untuk kegiatan terkait air minum dan PDAM adalah Rp3,79T atau 0,29% dari total belanja APBD secara nasional.

Top 3



Bottom 3



Kinerja PDAM

Berdasarkan data kinerja PDAM 2019, dari 380 PDAM, masih ada 156 PDAM yang dalam kondisi kurang sehat dan sakit. Adapun aspek yang dinilai meliputi keuangan, layanan, operasional, dan SDM dari PDAM. Nilai Rata-rata Nasional 3,35 (skala 1-5).

Top 3



Bottom 3



“Thousands have lived without love, not one without water”: Tantangan Penyediaan Air Minum

Pemenuhan air minum layak merupakan kebutuhan dasar manusia, karena kandungan air dapat mencapai 70% dari berat tubuh manusia. Bank Dunia pada 2014 mengingatkan bahwa 780 juta orang di dunia tidak memiliki akses air bersih dan mengakibatkan ribuan orang meninggal tiap hari akibat kekurangan air minum dan kerugian materi hingga 7% dari PDB dunia. Di Indonesia, program penyediaan air minum masuk dalam RPJMN 2015-2019 melalui program nasional Akses Universal Air Minum dan Sanitasi dengan target akses 100%. Namun demikian, penyediaan akses air minum pada tahun 2019 belum mencapai target dimana secara nasional cakupan layanan air minum layak baru mencapai 89,27%. Selain itu, masih ada ketimpangan pemenuhan air minum layak, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Untuk itu, pada RPJMN 2020-2024, Pemerintah melanjutkan kembali program penyediaan air minum dengan target capaian akses air minum layak sebesar 100%.

Tantangan Pemenuhan Layanan Air Minum di Indonesia



Penurunan Kuantitas dan Kualitas Air Baku.



- 23% kapasitas produksi menganggur, terutama kota besar.
- Pencemaran dari limbah produksi.
- Ketidakmerataan sumber daya air. Provinsi dengan ketersediaan air rendah (<40%): Jatim, Bali, NTB, NTT



Buruknya Manajemen Air Minum.



- Perencanaan tidak terintegrasi
- Program/ kegiatan yang tumpang tindih atau tidak terkoneksi antar dinas PUPR, Kesehatan, SDM, dan Lingkungan Hidup, dan antartingkat pemerintahan.
- Konflik pengelolaan air minum antardaerah akibat pemekaran.
- Minimnya kerjasama antardaerah



Kinerja PDAM Belum Dapat Optimal.



- 58,95% PDAM berstatus Sehat, 26,84% Kurang Sehat, dan 14,21% berstatus Sakit dari total 380 BUMD PDAM se-Indonesia.
- Tingkat Kehilangan Air (*Unaccounted for Water/UFW*) di Indonesia melebihi nilai max 20%. UFW Jakarta 47,5%, bahkan Sumatera Utara mencapai 67%.
- Politisasi pengelolaan air.

Kolaborasi dapat menjadi solusi pemenuhan layanan air minum layak dengan pendekatan *community empowerment*, antara lain **Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)**. Program ini telah mampu meningkatkan akses air minum pada 15.026 desa di lebih dari 233 daerah.

Program PAMSIMAS

- Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah dan desa.
- Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi.
- Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum.
- Hibah insentif.
- Dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan program.

Capaian PAMSIMAS

Persentase Akses Sarana Air Minum



77,8%

Akses <50%



11,1%

Akses ≥70% & <80%



11,1%

Akses ≥80% & <90%

KABAR DAERAH

1

Warga melakukan aksi di kantor Wali Kota Ternate.. Mereka menilai PDAM tidak berlaku adil soal penyaluran air bersih di beberapa kecamatan di Kota Ternate seperti di Pulau Hiri, Kecamatan Pulau Ternate. Warga mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 air bersih menjadi kebutuhan prioritas masyarakat dan perlu dibarengi dengan pelayanan maksimal. Di beberapa RT di Kelurahan Sulamadaha sudah tidak lagi menikmati air bersih secara merata. Air juga tidak layak konsumsi karena berlumpur. Sulamadaha memiliki 4 bak penampung yang dibangun sejak 2010, namun hanya 1 unit saja yang difungsikan.

<https://malutpost.id/> (diunduh 04 Oktober 2020)

2

Warga Desa Bontonyeleng, Kabupaten Bulukumba, mengeluhkan pelayanan PDAM, karena air tidak mengalir padahal sudah membayar mahal. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga terpaksa memanfaatkan air galon yang dibeli di warung. Pengelola PDAM Bontonyeleng, membenarkan adanya masalah aliran air PDAM dan salah satu penyebabnya adalah banyak warga yang mencuri air di Desa Balibo dan Anrihua. Ada ratusan sambungan pipa air PDAM ilegal di wilayah tersebut. Banyak sekali warga yang mengambil air PDAM dengan ilegal, memasang pipa dengan cara merusak pipa induk yang dipasang.

<https://makassar.sindonews.com/> (diunduh 04 Oktober 2020)

3

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk bekerja sama dengan PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung menyiapkan *solusi smart metering* yang menggunakan jaringan dan platform digital berbasis internet of things (IoT) seperti sistem billing terintegrasi, basis data yang terpusat, dan dashboard pengelolaan air. Selain layanan berbasis *connectivity*, PT Telkom juga memberikan layanan *managed solution* seperti *smart meter*, *leak detector sytem*, pencegahan *fraud*, monitoring kualitas air, *commad center* sehingga mendorong PDAM menjadi lebih efisien, maju, dan modern.

<https://www.antaranews.com/> (diunduh 04 Oktober 2020)



4

Sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) senilai Rp11,49 miliar akan dibangun di Pulau Sebira, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Pekerjaan akan dilakukan selama tiga bulan. Pembangunan SPALD ini bertujuan agar menghasilkan olahan berupa air yang memiliki baku mutu air limbah dan mengurangi pencemaran lingkungan serta mendukung kelestarian lingkungan di Kepulauan Seribu. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan SPALD-T skala perkotaan dan permukiman di ibu kota yang terdiri dari pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan jaringan perpipaan. Keberadaan IPAL ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses pelayanan air limbah, perbaikan kualitas lingkungan pada air permukaan dan air tanah, serta sumber air baku.

<https://www.metropolitan.id/> (diunduh 05 Oktober 2020)

5

Persoalan pemenuhan air bersih di Desa Fae dan Nututnana, Kecamatan Amanatun Selatan dalam waktu dekat akan segera teratasi lewat Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Lewat program Pamsimas, air dari sumber air permukaan Desa Fae akan disalurkan untuk melayani kebutuhan air bersih Desa Fae dan Nututnana. Air dari sumber mata air Fae akan dipompa masuk ke bak penampungan dengan menggunakan mesin bertenaga Surya. Kemudian air dari bak penampungan disalurkan ke kran-kran air yang ditempatkan di pemukiman dengan menggunakan gaya gravitasi. Nantinya pasca selesai dikerjakan, jaringan air bersih tersebut akan diserahkan ke Bumdes masing-masing desa untuk dipelihara dan dikelola secara baik.

<https://kupang.tribunnews.com/> (diunduh 04 Oktober 2020)

6

PT. Adhya Tirta Batam (ATB) merupakan tolak ukur pengelolaan air terbaik di Indonesia, karena telah mengalami transformasi besar dan berkembang menjadi perusahaan air bersih paling efektif dan efisien di Indonesia, dan diperhitungkan hingga level internasional. Konsep *Smart Water Management System* berbasis teknologi 4.0 yang diterapkan membuat perusahaan mampu mengefisiensi proses produksi, proses bisnis, dan tingkat kebocoran air tanpa mengorbankan jangkauan layanan. Saat ini jangkauan pelayanan air bersih PT. ATB di Batam telah menyentuh angka 99,7 persen, dengan tingkat kebocoran 14 persen per tahun. Kinerja tersebut dapat direplikasi oleh PDAM lainnya untuk mengelola air minum berorientasi layanan.

<https://batampos.co.id/> (diunduh 04 Oktober 2020)

INOVASI DAERAH


Layanan Zona Air Minum Prima Kota Malang

Pelayanan air siap minum atau air minum prima belum banyak dirasakan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia. Salah satu kota yang telah mampu memberikan layanan air siap minum adalah Kota Malang. Hal ini berkat pengelolaan air minum yang profesional oleh PDAM Kota Malang yang berdiri pada tahun 1974. Apresiasi dari dalam dan luar negeri telah diraih, mencakup penghargaan dari pelayanan sambungan rumah tangga, tingkat respons terhadap keluhan pelanggan, aspek manajemen, bidang informasi dan teknologi, dan PDAM pun termasuk BUMD berkategori sehat. Bukan tanpa hambatan yang dihadapi PDAM Kota Malang. Seperti perkotaan lainnya, pada awalnya Kota Malang menghadapi setidaknya 4 tantangan umum dalam pengelolaan layanan air minum. Pertama, tantangan kelembagaan yakni komitmen Pemda dan DPRD untuk memprioritaskan sektor air minum masih perlu didorong. Kedua, menyangkut keterbatasan pembiayaan, sehingga perlu memformulasikan skema pembiayaan yang inovatif. Tantangan ketiga adalah meningkatkan kapasitas PDAM agar menjadi lembaga yang kompeten, efisien, layak secara bisnis, dan berorientasi layanan. Terakhir adalah tantangan untuk memastikan ketersediaan air baku.

4 Strategi Utama


Program Kinerja Keuangan

penertiban kelompok pelanggan, penyesuaian tarif, pemberian keringanan, dan optimalisasi pinjaman untuk investasi jaringan pipa




Program Kinerja Pelayanan

perbaikan sistem data pelanggan, sistem penanganan pengaduan, dan survey kepuasan




Program Kinerja Operasional

pemeliharaan pipa dan pompa, pengamanan sumber air baku dan fasilitas produksi, dan penurunan tingkat kehilangan air



Program Kinerja SDM

sistem penilaian kinerja, pengembangan sistem informasi manajemen, dan penataan pegawai



Strategi tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan kolaborasi. Salah satunya adalah berkolaborasi dengan PDAM Kab. Malang untuk mengeksplorasi sumber mata air lainnya. Kolaborasi antarinstansi ini menjadi kunci sukses PDAM Kota Malang. Beberapa pemangku kepentingan lain dalam kolaborasi antara lain adalah Bappeda Kota Malang yang telah memberikan dukungan aspek regulasi, terutama Perda terkait Penyertaan Modal. Melalui Perda tersebut, PDAM Kota Malang sebagai BUMD dapat mengajukan modal pengembangan kepada Pemerintah Kota Malang melalui dana APBD. Keuntungan yang didapat sebagian diserahkan kepada Pemda, sebagian lagi digunakan PDAM Kota Malang dalam rangka pengembangan PDAM. Dukungan juga diberikan secara nyata oleh Dinas Kesehatan Kota Malang yang secara berkelanjutan mengadakan pengawasan kualitas air minum. Setiap tahun diambil sampel di titik-titik pelanggan yang menyebar ke seluruh Kota Malang, dan diperiksa secara mikrobiologi dan kimia.

Inovasi

Inovasi Program Zona Air Minum Prima (ZAMP)

01

ZAMP merupakan sebuah kawasan pelayanan dengan kualitas air setara dengan kualitas air minum, artinya pelanggan dapat langsung minum air PDAM tanpa perlu dimasak terlebih dahulu. Kualitas air siap minum tidak kalah dengan air kemasan, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dalam mengkonsumsinya.

Tidak hanya terbatas pada mengalirkan melalui sambungan rumah tangga, PDAM Kota Malang juga memfasilitasi penyediaan air siap minum (*fountain tap*) di tempat-tempat umum seperti Instansi pemerintahan, taman kota, sekolah-sekolah, hingga lapas.

02

Inovasi Pemasangan anjungan kran air siap minum (Fountain Tap)

Inovasi Total Water Utility Integrated Network Command Center (TCC)

03

Inovasi ini bisa memantau jumlah pengaduan, kebocoran air sekaligus mempercepat proses penanganannya, dan memantau pemakaian air sampai ke pelanggan setiap saat. PDAM Kota Malang juga sudah memiliki sistem Informasi manajemen yang terintegrasi untuk seluruh proses bisnis internal mulai pasangan baru, billing, work order, inventory, customer service, BBM, e office, e Procurement, e-SDM, e-RAB, GIS sampai dengan akuntansi.

PDAM Kota Malang menjadi BUMD yang responsif dan tercepat terhadap setiap pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui aplikasi lapor Sambat Web dan Sambat SMS. Semua pengaduan otomatis masuk dalam aplikasi *Work Order (by android)* yang langsung ditindaklanjuti dengan pengecekan ke lapangan. Respon atas pengaduan menjadi *report* nilai dan *KPI* masing-masing karyawan.

04

Inovasi Aplikasi Layanan Pengaduan link dengan Penilaian Kinerja Karyawan



KAJIAN PILIHAN

Pemda & KPBU: Tantangan *Multi-Level Governance* dalam Penyediaan Air Minum

Air minum merupakan salah satu jenis layanan publik yang telah diserahkan pengelolaannya kepada Pemda. Berdasarkan ketentuan perundangan, kewenangan dalam pengelolaan air minum didasarkan kepada wilayah air berada. Jika sumber air berada dalam satu wilayah, maka kewenangan pengelolaan juga menjadi kewenangan dari kabupaten/kota tertentu. Namun, jika sumber air melintasi wilayah kabupaten/kota, maka kewenangan pengelolaannya berada di Provinsi. Kebutuhan akan layanan air terus meningkat, tetapi dengan adanya keterbatasan sumber dana, kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi oleh Pemda. Untuk itu, perlu terobosan dalam mencari alternatif sumber pembiayaan, antara lain melalui skema KPBU. Namun demikian, progress KPBU di sektor air minum mengalami kendala, belum banyak proyek yang berhasil dan walaupun berhasil membutuhkan waktu yang lama. Kajian ini mengeksplorasi tantangan pelaksanaan KPBU dan bagaimana pembagian peran antarlevel pemerintah terhadap suksesnya skema KPBU di daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus dan pendekatan *multi-level governance theory* sebagai basis analisis. Salah satu yang menjadi obyek studi kasus adalah SPAM Umbulan sebagai proyek KPBU yang pertama kali berhasil dilaksanakan setelah proses yang cukup panjang.

Mengapa proyek KPBU SPAM Regional Umbulan proses penyiapannya panjang dan bagaimana proyek pertama dengan skema KPBU ini dapat berhasil dijalankan? Hasil studi kasus yang dilakukan, absennya *leadership* di awal-awal proses menyebabkan progres tidak berjalan dengan baik. Meskipun proyek ini adalah proyek provinsi dan menjadi prioritas nasional, namun proses negosiasinya tidak mudah karena melibatkan 5 kabupaten/kota yang masing-masing punya kepentingan, yaitu 1 daerah pemilik sumber mata air Umbulan, 1 daerah yang memiliki latar belakang historis, dan 3 daerah yang membutuhkan air. Seiring dengan bergantinya pimpinan di Provinsi Jawa Timur, komunikasi dan negosiasi berjalan lebih baik, sehingga progress penyelesaiannya menjadi lebih baik.

Namun demikian, faktor lain yang mendukung keberhasilan proyek ini adalah bahwa di dalam *arrangement*-nya, terdapat pembagian peran antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Pembagian Peran dilakukan terhadap aspek-aspek penyiapan proyek seperti aspek *bankability* dan aspek *marketability*. Pada aspek *bankability*, Pemerintah Pusat dan Provinsi berperan penting dalam menjadikan proyek ini menjadi *financially feasible* dan layak diberikan kredit (*creditworthiness*). Pada aspek teknis dan legal, masing-masing tingkat pemerintahan bertanggung jawab sesuai dengan perannya, baik itu sebagai regulator, pemilik proyek dan penerima manfaat. Sedangkan untuk aspek *marketability*, peran pemda yang paling menentukan.

Salah satu temuan yang menarik dari kajian ini adalah menjadikan DAK sebagai kompensasi bagi daerah pemilik sumber daya air agar mau terlibat dalam proyek SPAM Regional Umbulan ini. Temuan ini bisa menjadi input bagi regulasi ke depan bahwa untuk memberdayakan kerja sama antardaerah dibutuhkan skema insentif selain dari aspek administratifnya. Selain itu, dalam skema Umbulan ini, pola pendanaan dapat digunakan sebagai contoh sukses penerapan pendanaan terintegrasi, di mana KPBU didukung dengan belanja pusat maupun TKDD untuk mendukung target capaian layanan air minum.

Pembagian Peran dalam skema KPBU SPAM Umbulan

Policy Decision Making	Role of Actors in Umbulan Water Project			Notes
	Central	Provincial	Local	
1. Bankability Aspect				
Financial Feasibility	main	supporting	-	CG Provide VGF (market composition is 70% domestic and 30% non-domestic)
Creditworthiness	main	main	-	Double Layer Guarantee from CG and the Contracting Agency
Technical Feasibility	supporting	main	main	
Legal Feasibility	main	main	main	
2. Marketability aspect				
	-	supporting	main	Five PDAMs act as the main water off-taker

Penulis: Radies K. Purbo